

Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di Indonesia

Impact of Village Funds on the Gap the Human Development Index in Rural-City Areas in Indonesia

Artha Graciela Pandiangan¹, Dominicus Savio Priyarsono², Mutiara Probokawuryan³

^{1, 2, 3}Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jalan Agatis, Kampus Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
Korespondensi: Arthapandiangan999@gmail.com

[diterima: Desember 2021- revisi: Desember 2021– diterbitkan daring: Desember 2021]

ABSTRAK

Kesenjangan pembangunan masih menjadi isu yang penting. Hal ini terlihat dalam salah satu tujuan pada kerangka acuan pembangunan negara-negara di dunia yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu bentuk kesenjangan yang sering terjadi di wilayah regional adalah kesenjangan pembangunan manusia. Kesenjangan pembangunan manusia yang terdapat pada desa dan kota menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan. Kesenjangan dalam pembangunan manusia dapat didekati dari indikator indeks pembangunan manusia. Program penyaluran Dana Desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kesenjangan pembangunan pada setiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap kesenjangan pembangunan manusia desa kota di Indonesia periode 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dana desa berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pembangunan manusia Indonesia yang diwakili oleh angka harapan hidup, kesenjangan rata-rata lama sekolah, dan kesenjangan per kapita pada wilayah pedesaan dan perkotaan di Indonesia.

Kata Kunci: Dana Desa, Data Panel, Kesenjangan Pembangunan Manusia

ABSTRACT

The development gap is still an important issue. This can be seen in one of the goals in the framework of reference for the development of countries in the world which is formulated in the Sustainable Development Goals (SDGs). One form of inequality that often occurs in the region is the human development gap. The gap in human development in rural and urban areas causes a welfare gap. The gap in human development can be approached from the indicators of the human development index. The Village Fund distribution program is one of the efforts made by the government to reduce the number of development gaps in each region. This study aims to analyze the effect of village funds on the urban-rural human development gap in Indonesia for the 2015-2019 period. The analytical method used is descriptive analysis and panel data analysis. The results showed that the village fund program had a negative effect on the gap in Indonesia's human development, which was represented by life expectancy, the gap in average length of schooling, and the gap per capita in rural and urban areas in Indonesia.

Keywords: Village Funds, Panel Data, Inequality of Human Development

JEL Classification: D13, Q02, Q11, Q28

PENDAHULUAN

Kesenjangan merupakan suatu permasalahan yang bersifat kompleks serta memerlukan kolaborasi intervensi berbagai lembaga pemerintahan dalam mengatasinya. Salah satu bentuk kesenjangan yang sering terjadi di wilayah regional adalah kesenjangan pembangunan manusia. Kesenjangan pembangunan manusia yang terdapat pada desa dan kota menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan. Berdasarkan Hidayat (2020), kesejahteraan masyarakat kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi urban bias pada proses pembangunan di Indonesia. Lipton (1991) menegaskan bahwa urban bias terjadi karena adanya pengalokasian yang tidak merata. Pembangunan lebih berfokus pada wilayah perkotaan daripada di perdesaan dan menyebabkan terjadinya urban bias yang mencerminkan alokasi sumber daya lebih berpihak terhadap wilayah perkotaan.

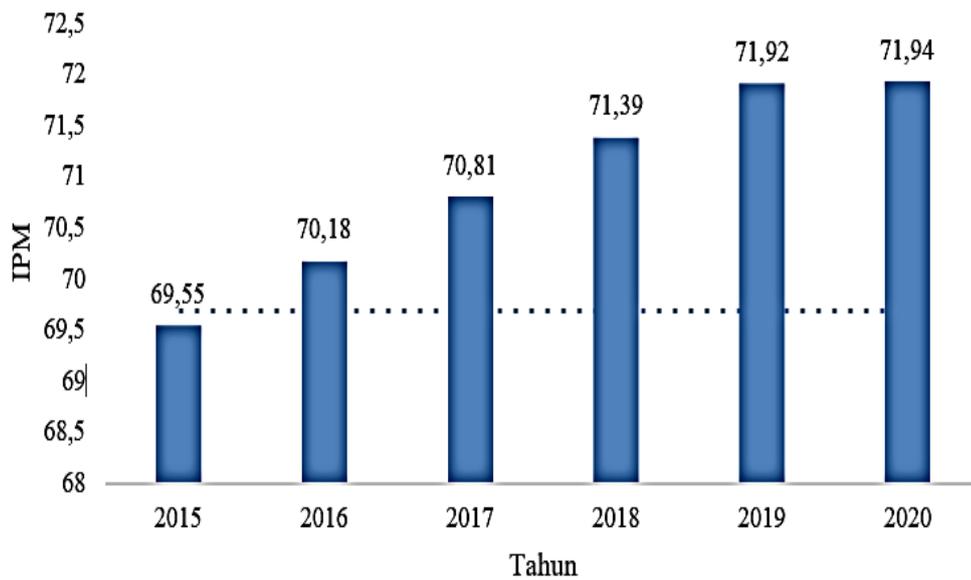
Kesenjangan pembangunan manusia merupakan kondisi yang menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan pembentukan kapabilitas dasar manusia dan pemanfaatan kapabilitas tersebut dalam kehidupan manusia. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi yaitu sebesar 80.77 sementara posisi terendah diduduki oleh Provinsi Papua sebesar 60,44. Selisih antara IPM sebesar 20.33 ini mengindikasikan terdapat kesenjangan pembangunan manusia yang tinggi antarprovinsi di Indonesia.

Untuk mempercepat laju pembangunan manusia di suatu negara dapat dicapai dengan pemerataan distribusi pendapatan dan

pengalokasian belanja publik sektor kesehatan dan pendidikan (UNDP 2004). Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan. Masyarakat yang terdidik, sehat, dan produktif akan meningkatkan konsumsi dan pengeluaran masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi daerah membaik dan celah kesenjangan antardaerah semakin sempit (Dewi *et al.* 2016).

Pada tahun 1990, UNDP untuk pertama kali memperkenalkan konsep IPM. IPM dibentuk melalui beberapa indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak (BPS 2014). Angka harapan hidup digunakan untuk mengukur indeks kesehatan dan mengindikasikan rata-rata lama hidup yang akan dijalani seorang individu semasa hidupnya (BPS 2019). Selanjutnya indeks pendidikan diukur dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (BPS 2019). Sedangkan indeks standar hidup layak diukur dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS 2019).

Berdasarkan publikasi BPS 2020, IPM Indonesia dari tahun 2015-2020 menunjukkan tren yang meningkat dan pembangunan manusia mengalami perbaikan kualitas (Gambar 1). Hal ini ditunjukkan pada tahun 2015, IPM Indonesia menunjukkan angka 69.55 dan pada periode selanjutnya mengalami peningkatan secara berkala. Pada tahun 2020 persentase IPM menempati posisi tertinggi yaitu 71.94. Namun pada periode 2019-2020 terjadi perlambatan peningkatan IPM di Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan IPM hanya berubah sebesar 0.02 poin dari 71.94 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang telah memengaruhi pembangunan manusia di Indonesia.

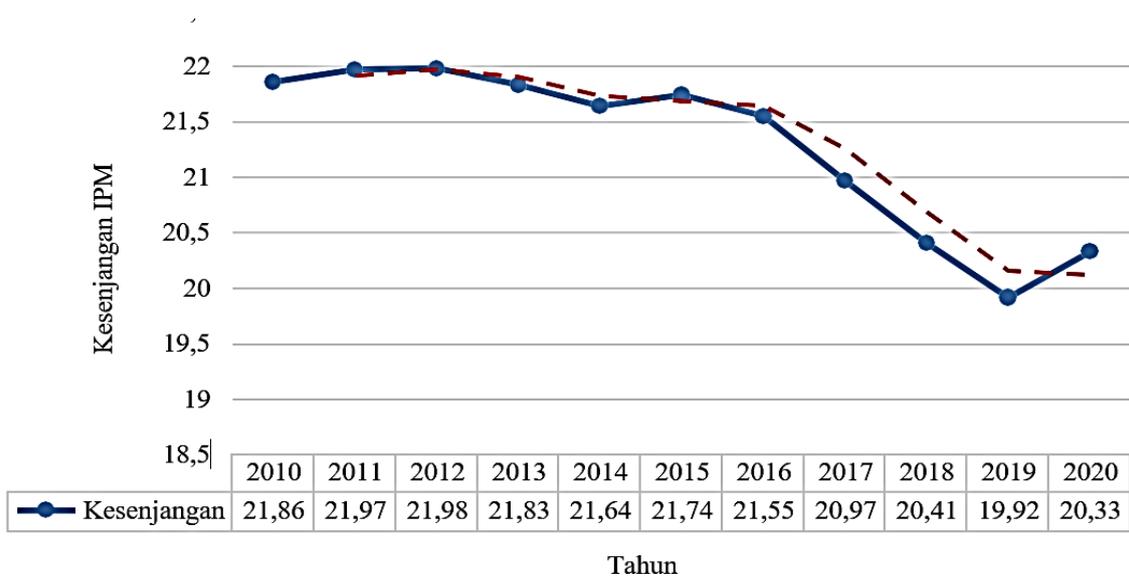


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2020

Kesenjangan pembangunan manusia antarprovinsi menjadi masalah yang tidak dapat dihindari dalam proses perkembangan IPM. Kesenjangan IPM Indonesia selama periode 2010-2019 masih menunjukkan celah kesenjangan yang lebar namun cenderung

mengalami penurunan dan ditandai Papua selalu menjadi provinsi dengan IPM terendah dan DKI Jakarta selalu menjadi provinsi dengan IPM tertinggi se-Indonesia (Gambar 2).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

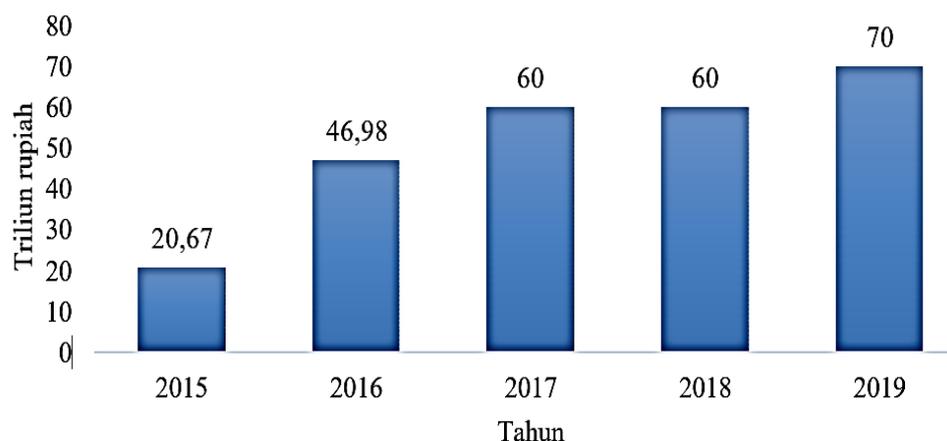
Gambar 2. Tren Selisih IPM Provinsi Tertinggi dan Provinsi Terendah Tahun 2010- 2020

Pada periode 2010-2014 menunjukkan bahwa kondisi IPM Indonesia cenderung stagnan. Sedangkan, tren perkembangan kesenjangan IPM level nasional pada tahun 2015-2019 mengalami perbaikan. Selisih IPM antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua semakin kecil sebesar 19.92 yang disebabkan laju IPM di provinsi terendah mengalami peningkatan lebih tinggi daripada laju peningkatan provinsi tertinggi. Peningkatan IPM Papua selama 2018-2019 adalah sebesar 0.78 poin. Sementara IPM Provinsi DKI Jakarta tumbuh hanya sebesar 0.29 poin pada periode yang sama. Sementara pada tahun 2020, kesenjangan IPM provinsi tertinggi dan terendah mengalami peningkatan kembali. Hal ini diakibatkan oleh pandemi yang menyebabkan penurunan laju indikator pengeluaran per kapita di Papua lebih tinggi sebesar 5.2% dibandingkan DKI Jakarta yaitu sebesar 1.62%.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPM tertinggi selama sepuluh tahun kebelakang mengakibatkan berkembangnya

pembangunan dan perekonomian yang cepat di DKI Jakarta dibandingkan daerah lain (Al Karim *et al.* 2019). Ketersediaan berbagai fasilitas dan akses seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya menjadikan masyarakat DKI Jakarta dapat melakukan aktivitasnya dengan mudah. Berbeda dengan daerah di Provinsi Papua yang masih banyak daerah terisolasi dan belum tersentuh oleh pelayanan publik yang memadai, sehingga provinsi ini memiliki jumlah daerah tertinggal paling banyak di Indonesia (Bappeda Papua 2020).

Peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diperlukan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di Indonesia. Hal ini melahirkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga, munculnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah salah satu Belanja Negara yang disalurkan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal (Kemenkeu 2020).



Sumber: Kemenkeu, 2020 (diolah)

Gambar 3. Anggaran Dana Desa tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)

Dana desa telah ditetapkan pemerintah Indonesia melalui APBN (PP 8/2016) sejak tahun 2015 sampai sekarang dan menjadi tambahan sumber penerimaan desa.

Penyaluran dana desa kepada setiap desa merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk mempersempit celah kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar

kabupaten/kota di Indonesia. Pada kurun waktu 2015 hingga 2019, jumlah anggaran dana desa yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat. Peningkatan jumlah dana desa pada Gambar 3 mencerminkan komitmen dan fokus pemerintah dalam pengentasan masalah kesenjangan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan perkembangan dana desa dan kesenjangan indeks pembangunan manusia yang terjadi di Indonesia. 2) analisis pengaruh dana desa terhadap kesenjangan indeks pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keadaan kesenjangan indeks pembangunan manusia yang terbagi menjadi tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan.

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada berbagai aspek agar tercapainya kesejahteraan penduduk (Suradi 2007). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan manusia diukur dengan IPM dan mencakup aspek fisik (kesehatan dan kesejahteraan) dan non fisik (intelektualitas) manusia. Indeks Kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), indeks pendidikan diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP).

Kesenjangan Pembangunan Manusia

Kesenjangan ini terjadi pada proses pembangunan manusia. Kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah terjadi pada indikator pembentuknya (Bappenas 2011). Secara umum, kesenjangan pembangunan manusia terjadi pada indikator penyusun IPM termasuk kesehatan dan pendidikan serta standar hidup layak. Menurut BPS, kesenjangan IPM pada bidang pendidikan tampak pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Dana Desa

Dana desa merupakan sumber pendanaan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui APBN kepada desa dan daerah tertinggal untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan wilayahnya (Kemenkeu 2017). Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk agar membaik.. Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat mandiri oleh desa dan kewenangan untuk mengelolanya diberikan kepada aparat desa dalam hal pemanfaatan (anggaran belanja).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan dana yang dihasilkan dari potensi ekonomi daerahnya sendiri. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, PAD bersumber dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan

Menurut Kementerian Keuangan, dana perimbangan merupakan pendanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan bersumber dari APBN. Dana

perimbangan dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu untuk memperoleh kehidupan yang selayaknya berlaku dalam masyarakat umum (Pudjianto dan Syawie 2015). Penduduk yang tergolong miskin merupakan penduduk yang pengeluarannya atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan (Haughton & Shahidur 2012).

Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP merupakan sejumlah balas jasa berupa uang yang diserahkan oleh pemilik usaha untuk tenaga kerja atas jasa yang diberikan pekerja. Besaran UMP pada dasarnya telah diatur pemerintah dan berlaku terhadap masing-masing provinsi dengan syarat memenuhi standar hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel dengan *cross section* (deret lintang) dengan jumlah 32 provinsi yang ada di Indonesia dan data *time series* (deret waktu) dengan periode 2015-2019. Variabel data yang digunakan adalah kesenjangan Angka Harapan Hidup (AHH), kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Kesenjangan Pengeluaran Per Kapita (PPP), Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Penduduk Miskin, dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Data utama yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Adapun data pendukung yang digunakan bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Untuk menghitung tingkat kesenjangan digunakan data AHH, RLS, PPP tingkat kota/kabupaten di Indonesia, dimana data kota mewakili daerah perkotaan dan data kabupaten mewakili daerah pedesaan. Kesenjangan didapatkan dari pengurangan rata-rata AHH, RLS, PPP perkotaan dengan pedesaan. Sehingga, didapatkan data kesenjangan rata-rata AHH, RLS, dan PPP antara desa dan kota di tingkat Provinsi di Indonesia.

Metode Analisis dan Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif melalui analisis regresi data panel. Pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan program *Eviews10* dan *Microsoft Excel 2019*.

Analisis Data Panel

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data panel statis untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap kesenjangan IPM tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi data panel, yaitu *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

Model *Pooled Least Square (PLS)* merupakan pendekatan dengan menggabungkan semua data deret waktu dan kerat lintang, sehingga derajat bebas mengalami peningkatan (Firdaus 2011). Berikut merupakan perumusan bentuk pendekatan PLS secara umum :

$$Y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta + \mu_{it}$$

Y_{it} adalah variabel dependen, X_{it} adalah variabel independen, α adalah intersep, β adalah *slope* dan μ_{it} adalah *error*.

Adapun *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan metode panel statis yang menggunakan nilai intersep yang berbeda terhadap setiap subjek (*cross section*), tetapi *slope* pada setiap subjek tetap sama seiring waktu (Gujarati 2003). Sedangkan metode *Random Effect Model* (REM) merupakan pendekatan yang terbentuk karena tidak adanya korelasi antara efek individu dan regresor (Firdaus 2011).

Pengujian Kesesuaian Model

Pengujian kesesuaian diperlukan ketika penelitian menggunakan data panel. Model estimasi yang terbaik untuk dipilih pada pengolahan data dapat dilakukan melalui beberapa pengujian, yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan pilihan model terbaik antara model FEM atau PLS yang akan digunakan saat mengestimasi data panel. Hipotesis uji chow secara umum:

H_0 : *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square* (PLS)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

H_0 ditolak ketika F-statistik lebih besar dari F-tabel pada tingkat signifikansi tertentu.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk mempertimbangkan model terbaik antara model FEM atau REM. Berikut hipotesis dalam uji hausman:

H_0 : REM

H_1 : FEM

H_0 ditolak atau saat nilai statistik

Hausman yang diperoleh dari hasil pengujian lebih besar dari *chi square*. Hal tersebut berarti model terbaik yang dipilih adalah *FEM*.

3. Uji Lagrange Multiple (LM)

Uji *Langrange Multiplie* (LM) dilakukan untuk membandingkan apakah PLS atau REM yang lebih sesuai.

H_0 : PLS

H_1 : REM

Penolakan H_0 terjadi jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai *chi square*. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan model terbaik yang dipilih adalah *REM*.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan untuk memverifikasi apakah data yang dikumpulkan terdistribusi normal. Jika jumlah data yang diamati dalam penelitian melebihi 30 ($n > 30$), maka data tersebut sudah dapat diasumsikan terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dijalankan untuk memeriksa hubungan linier sempurna antara variabel independen dalam model.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat autokorelasi antar sisaan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Permasalahan heteroskedastisitas terjadi saat pengamatan pada variabel independen mempunyai ragam sisaan tidak konstan. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan standar error bias ke bawah dan estimasi koefisien regresi tidak efisien.

Model Penelitian

Penelitian ini mengacu pada studi empiris yang dilakukan oleh Balseven dan (Balseven dan Tugcu 2017) yang menganalisis pengaruh dari transfer fiskal pemerintah terhadap dua kategori wilayah, yaitu negara maju dan berkembang. Sementara itu, penggunaan variabel dalam penelitian ini berdasarkan jenis transfer fiskal yang ada di Indonesia yaitu dana desa. Dihipotesiskan, terdapat perbedaan dampak dana desa terhadap kesenjangan pembangunan manusia di provinsi Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka spesifikasi model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kesenjangan Angka Harapan Hidup

$$\text{AHHIneq}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LNDD}_{it} + \beta_2 \text{LNPAD}_{it} + \beta_3 \text{LNDAU}_{it} + \beta_4 \text{LNDAK}_{it} + \beta_5 \text{LNDBH}_{it} + \beta_6 \text{POV}_{it} + \beta_7 \text{LNUMP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah

$$\text{RLSIneq}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LNDD}_{it} + \beta_2 \text{LNPAD}_{it} + \beta_3 \text{LNDAU}_{it} + \beta_4 \text{LNDAK}_{it} + \beta_5 \text{LNDBH}_{it} + \beta_6 \text{POV}_{it} + \beta_7 \text{LNUMP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Kesenjangan Pengeluaran Per Kapita

$$\text{PPPIneq}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LNDD}_{it} + \beta_2 \text{LNPAD}_{it} + \beta_3 \text{LNDAU}_{it} + \beta_4 \text{LNDAK}_{it} + \beta_5 \text{LNDBH}_{it} + \beta_6 \text{POV}_{it} + \beta_7 \text{LNUMP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

AHHIneq_{it} = Persentase Kesenjangan Angka Harapan Hidup Provinsi terhadap nilai maksimum AHH Provinsi pada tahun t (%)

RLSIneq_{it} = Persentase Kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi terhadap nilai maksimum RLS Provinsi pada tahun t (%)

PPPIneq_{it} = Persentase Kesenjangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi terhadap nilai maksimum AHH Provinsi pada tahun t (%)

DD_{it} = Dana Desa Provinsi pada tahun t (ribu rupiah)

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah Provinsi pada tahun t (rupiah)

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum Provinsi pada tahun t (rupiah)

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus Provinsi pada tahun t (rupiah)

DBH_{it} = Dana Bagi Hasil Provinsi pada tahun t (rupiah)

POV_{it} = Jumlah Penduduk Miskin Provinsi pada tahun t (%)

UMP_{it} = Upah Minimum Provinsi setiap provinsi pada tahun t (rupiah)

i = provinsi

t = tahun

α = intersep

β_n = parameter yang diestimasi

ε_{it} = *error term*

Variabel tidak bebas dalam model ini menggunakan variabel AHH, RLS, dan PPP dalam satuan unit persentase. Hal ini didapatkan melalui rumus:

$$\text{AHH/RLS/PPP} =$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dana Desa di Indonesia

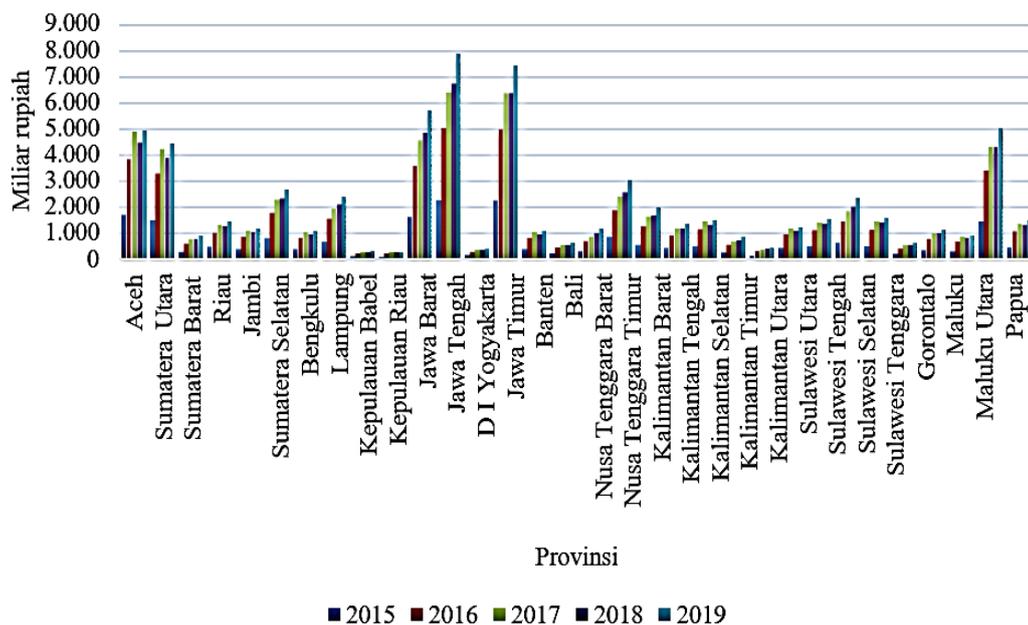
Pada dasarnya program dana desa ditetapkan pemerintah pusat sebagai upaya dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan di seluruh wilayah Indonesia. Program dana desa telah menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo sejak terpilihnya menjadi Presiden Indonesia dan pertama kali direalisasikan pada tahun 2015.

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar realisasi dana desa

disalurkan dengan strategi padat karya yaitu *cash for work*. Untuk merealisasikan pelaksanaan arahan tersebut, Menteri Keuangan melakukan perubahan terhadap PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (DPJK 2018).

Jumlah anggaran dana desa yang disalurkan pada setiap provinsi berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pemerintah menerapkan formula khusus dalam pembagian dana desa.

Berdasarkan PP No.49/PMK.07/2016, formula pembagian dana desa terbagi menjadi 90% alokasi dasar dan 10% alokasi formula. Sejak awal direalisasikannya program dana desa, anggaran terbesar diberikan pada pulau Jawa (Gambar 4) atau setara dengan 31.36% dari total dana desa yang dialokasikan. Sedangkan pulau dengan jumlah dana desa terendah berada pada pulau Nusa Tenggara senilai 6.26% dari total dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah 5.127 desa.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019 (diolah)

Gambar 4. Perkembangan Dana Desa setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019.

Dengan formulasi yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, dana desa yang diterima setiap daerah berbeda berdasarkan kondisi daerah setiap tahunnya. Secara umum jika dilihat dari tren realisasi penyaluran dana desa secara menyeluruh berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2015-2019, pemberian dana desa terbesar ada di pulau Jawa, terutama pada Jawa Tengah sebesar 34.98% dan Jawa Timur sebesar 32.99% dari total dana desa yang dialokasikan untuk seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh pemerintah

mempertimbangkan faktor jumlah penduduk untuk mendistribusikan dana desa. Kepadatan penduduk Pulau Jawa yang terkonsentrasi di wilayah tersebut menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah semakin lebar sehingga memerlukan upaya pemerataan.

Pemanfaatan dana desa yang diatur dalam PP No.43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Tabel 1. Persentase Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2018

Bidang	2015	2016	2017	2018
Pembangunan	76%	81%	81%	81%
Pemberdayaan Masyarakat	11%	12%	14%	16%
Penyelenggaraan Pemerintahan	9%	4%	2%	1%
Pembinaan Kemasyarakatan	4%	3%	2%	2%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2019

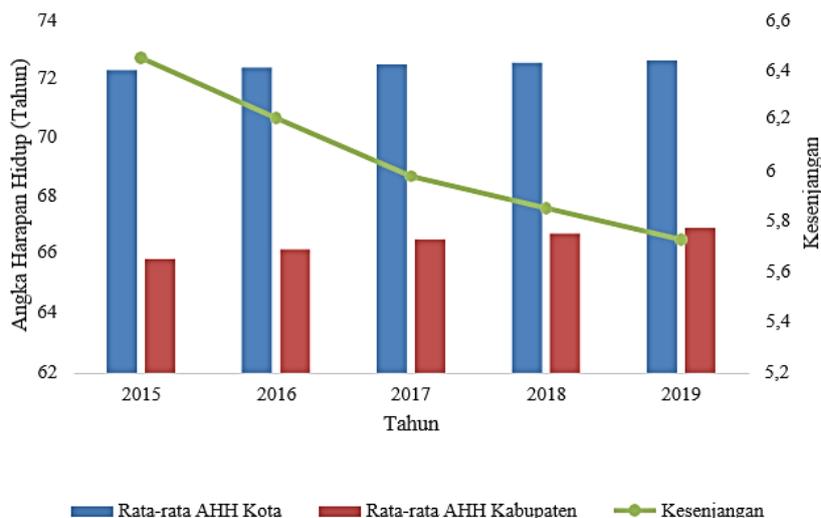
Besarnya porsi dana desa bidang pembangunan berupa infrastruktur, sarana, dan prasarana masih menjadi prioritas (Kemendes PDTT 2018). Sedangkan penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat jauh lebih kecil dibanding pembangunan, namun selama kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Persentasi penggunaan dana desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan sangat kecil.

Perkembangan Kesenjangan Pembangunan Manusia di Indonesia

IPM merupakan indeks komposit yang menggambarkan pencapaian kesejahteraan yang dirangkum dalam beberapa indikator sehingga dapat mencerminkan kemampuan dasar masyarakat di suatu wilayah.

Perbedaan capaian pembangunan manusia antar kabupaten dan kota terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini mengimplikasikan bahwa tingkat kesenjangan IPM pada kabupaten lebih besar dibanding kota. Provinsi Papua pada tahun 2018 dan 2019 memiliki IPM terendah dibanding provinsi lainnya. Kesenjangan IPM tertinggi juga dimiliki oleh Pulau Papua dari tahun 2015 hingga 2019.

Indikator penyusun IPM lainnya adalah dengan indikator Kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) yang ditunjukkan pada gambar 5, bahwa perkembangan kesenjangan Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi yang terjadi di Indonesia ditunjukkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, namun cenderung menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2015-2019.

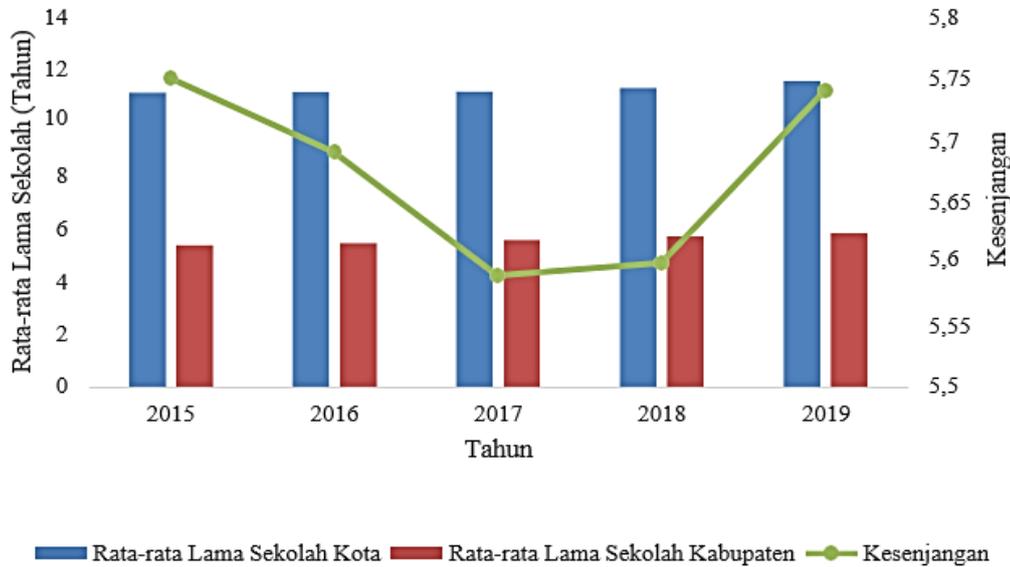


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 5. Kesenjangan AHH Provinsi Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2019

Indikator penyusun IPM selanjutnya adalah pendidikan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dapat dilihat pada gambar 6, Provinsi Papua menjadi provinsi dengan kesenjangan RLS tertinggi di

Indonesia pada periode 2015-2019. Hal ini terjadi disebabkan peningkatan RLS pada kabupaten di Provinsi Papua lebih rendah daripada pertumbuhan RLS pada wilayah perkotaan.

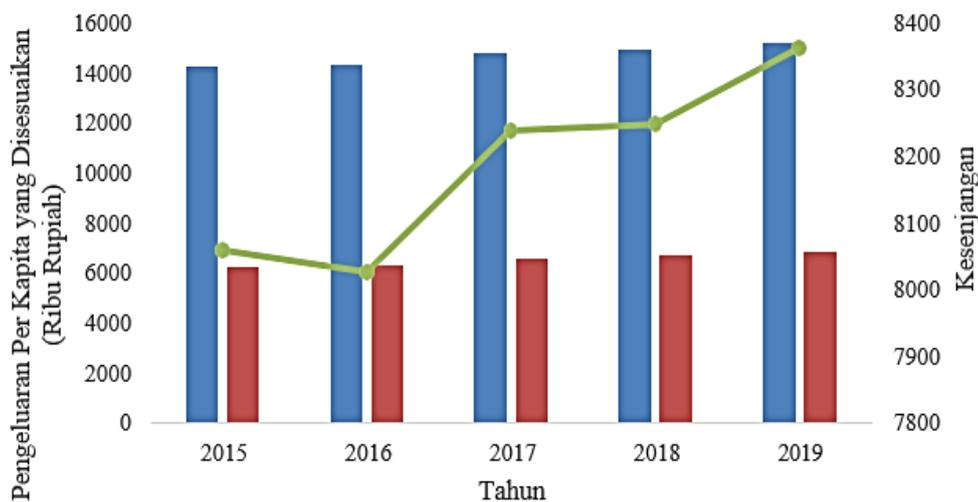


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 6. Kesenjangan RLS Provinsi Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2019

Sama seperti indikator RLS, Provinsi Papua menjadi daerah dengan kesenjangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (PPP) tertinggi di Indonesia selama periode 2015-2019. Berdasarkan Gambar 7, rata-rata PPP pada kabupaten dan kota di Provinsi

Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya. selama periode 2015-2019. Berdasarkan Gambar 7, rata-rata PPP pada kabupaten dan kota di Provinsi mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 7. Kesenjangan PPP Provinsi Tertinggi di Indonesia Tahun 2015-2019

**Pengaruh Dana Desa terhadap
Kesenjangan Pembangunan Manusia
Wilayah Desa Kota di Indonesia**

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Pemilihan Model Terbaik

Tabel 2. Output Uji Chow dan Uji Hausman

Jenis Uji	Probabilitas		
	Kesenjangan AHH	Kesenjangan RLS	Kesenjangan PPP
Uji Chow	0.0000	0.0000	0.0000
Uji Hausman	0.0161	0.0175	0.0309
Kesimpulan	FEM	FEM	FEM

Sumber : Eviews 10 (diolah)

FEM menjadi model terbaik yang dipilih berdasarkan Uji Chow. Sementara hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas pada model Kesenjangan AHH, Kesenjangan RLS, dan Kesenjangan PPP kurang dari taraf nyata 5%. Oleh karena itu, FEM merupakan model terbaik yang dapat digunakan.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan model persamaan kesenjangan AHH, kesenjangan RLS, dan kesenjangan PPP dihasilkan nilai probabilitas Jarque-Bera lebih dari taraf

nyata 5% maka dapat disimpulkan *error term* tidak terdistribusi normal. Namun berdasarkan Gujarati (2009) hal ini dapat diabaikan karena jumlah observasi cukup besar ($n > 30$).

2. Uji Multikolinieritas

Tidak ditemukannya masalah multikolinieritas pada ketiga model karena hasil estimasi menunjukkan angka kurang dari $|0.8|$.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 menunjukkan bahwa model tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas Output FEM

	IneqAHH		IneqRLS		IneqPPP	
	<i>Unweighted Statistics</i>	<i>Weighted Statistics</i>	<i>Unweighted Statistics</i>	<i>Weighted Statistics</i>	<i>Unweighted Statistics</i>	<i>Weighted Statistics</i>
<i>Sum Squared Resid</i>	4.605	4.002	57.147	51.424	14.123	13.924
<i>DW Statistic</i>	2.515	1.332	1.071	1.579	1.221	1.556

Sumber : Eviews 10 (diolah)

4. Uji Autokorelasi

Pada model kesenjangan AHH pada Tabel 3, nilai *DW Statistic* sebelum diboboti berada pada $0 < dw < dL(2.515)$, maka dapat disimpulkan terdapat masalah autokorelasi negatif. Sedangkan untuk model penelitian kesenjangan RLS dan kesenjangan PPP menunjukkan terdapat masalah autokorelasi positif.

Hasil Pengujian Kriteria Terbaik

Berdasarkan tabel 4, menjelaskan bahwa sebesar 99.96% keragaman yang terdapat pada variabel kesenjangan AHH dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan 99.52% keragaman yang terdapat pada variabel kesenjangan RLS dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Selanjutnya sebesar 99.89% keragaman yang terjadi pada variabel kesenjangan PPP dapat dijelaskan oleh variabel bebas.

Tabel 4. Hasil Regresi Pengaruh Dana Desa terhadap Komponen Indeks Pembangunan manusia

Var. Bebas	Variabel Terikat					
	AHHIneq		RLSIneq		PPPIneq	
	Coef	Prob	Coef	Prob	Coef	Prob
LNDD	-0.020530	0.0218**	-0.732103	0.0000***	-0.225320	0.0365**
LNPAD	0.021502	0.0150**	0.036814	0.7328	0.007709	0.7894
LNDAU	-0.006362	0.1627	-0.015459	0.9019	-0.097451	0.2113
LNDAK	-0.003818	0.0963*	-0.064458	0.0357**	-0.038464	0.0760*
LNDBH	0.013278	0.0161**	0.272563	0.0175**	0.276362	0.0001***
POV	0.004059	0.0313**	0.056393	0.0001***	0.005268	0.6119
LNUMP	-0.276014	0.0000***	-0.086172	0.7828	-2.283278	0.0000***
C	6.730638	0.0000	22.92245	0.0007	-10.72381	0.0698
R-squared	0.9996		0.9952		0.9989	
F-stat	0.0000		0.0000		0.0000	

Ket : ***) signifikan pada taraf nyata 1%, **) signifikan 5%, *) signifikan 10%

Sumber : Eviews 10 (diolah)

Nilai Probabilitas F-statistik ketiga model penelitian adalah 0.0000 yang berarti signifikan pada taraf nyata 5%. Artinya terdapat minimal satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dalam ketiga model.

Selanjutnya uji-t digunakan untuk menginterpretasikan probabilitas setiap variabel dalam model. Dari uji-t terdapat enam variabel yang signifikan pada model kesenjangan AHH yaitu dana desa, PAD, DAK, DBH, jumlah penduduk miskin dan UMP. Sedangkan DAU tidak signifikan memengaruhi kesenjangan AHH. Sedangkan untuk model RLS, variabel yang signifikan

adalah variabel dana desa, DAK, DBH, dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan variabel PAD, DAU dan UMP tidak signifikan memengaruhi kesenjangan RLS. Selanjutnya variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan pengeluaran per kapita diantaranya dana desa, DAK, DBH, dan UMP.

Interpretasi Model

1. Kesenjangan Angka Harapan Hidup (AHHIneq)

Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan AHH adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dengan koefisien sebesar 0.021502. Hal ini dikarenakan masing-masing provinsi memiliki kemampuan kemandirian untuk meningkatkan PAD yang berbeda-beda. daerah yang memiliki PAD yang lebih tinggi dapat mengalokasikan penerimaannya dalam bidang kesehatan sedangkan wilayah yang memperoleh PAD yang lebih rendah.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dengan koefisien sebesar 0.013278, dan jumlah penduduk miskin (POV) sebesar 0.004059. Hasil ini didukung oleh studi empiris Surya et al. (2015) yang menyimpulkan bahwa DBH mempengaruhi anggaran belanja daerah seperti kesehatan. Besarnya anggaran DBH diperoleh dari kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya alam dan pajak yang ada. Semakin mampunya suatu provinsi meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pajak secara optimal, maka pendapatan daerah yang berasal dari DBH akan semakin besar. Setiap daerah memiliki porsi yang berbeda seperti yang tercantum dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 23. Kemudian, kemiskinan mengakibatkan rendahnya produktivitas individu dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya. Apabila tingkat kemiskinan dalam suatu daerah tinggi, maka penduduk daerah tersebut sulit untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas.

Sedangkan, variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan AHH adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan koefisien sebesar -0.003818, Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan koefisien sebesar -0.276014 dan Dana Desa (DD) dengan koefisien sebesar -0.020530.

Berdasarkan studi empiris Adami (2016), DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja langsung bidang kesehatan. Tentu hal ini dapat memperbaiki kualitas kesehatan di daerah tersebut semakin membaik. Terkait variabel UMP, peningkatan dalam pendapatan per kapita akan menyebabkan semakin tingginya kemampuan individu untuk mencukupi kebutuhan primernya seperti meningkatkan perbaikan gizi agar lebih sehat.

Salah satu tujuan pemberian dana desa adalah untuk peningkatan pelayanan publik seperti kesehatan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ma'ruf dan Andy Dwi Bayu Bawono (2019), Arifatun et al. (2019) serta penelitian Fadmawati dan Bawono (2018) yang menyimpulkan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja kesehatan. Sehingga dengan meningkatnya pelayanan publik pada bidang kesehatan, AHH daerah yang memperoleh dana desa akan meningkat.

Terakhir, variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan AHH adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dikarenakan jumlah anggaran yang diberikan pemerintah pusat dalam pengalokasian DAU berbeda-beda pada setiap provinsi.

2. Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah (RLSIneq)

Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan RLS adalah jumlah penduduk miskin (POV) dengan koefisien sebesar 0.056393 dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan koefisien sebesar 0.272563. Hasil ini didukung oleh penelitian Dueramae (2017) yang menyimpulkan bahwa kemiskinan akan menyebabkan tingkat

pendidikan yang rendah karena dalam memperoleh pendidikan diperlukan biaya. Kemudian, semakin tinggi DBH mengindikasikan daerah tersebut mampu mengelola sumber daya alam dan pajak secara maksimal. Sehingga daerah yang memperoleh DBH tinggi dapat mengalokasikan pendapatan daerah tersebut dalam sektor pendidikan.

Selanjutnya, untuk variabel yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan RLS adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan koefisien sebesar -0.086172 dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan koefisien sebesar -0.015459. Hasil ini didukung oleh penelitian Mahulauw et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengeluaran bidang pendidikan. Hal tersebut terjadi karena secara rasional penduduk akan mendahulukan kebutuhan dasarnya seperti makanan. Kemudian, Setiawan (2010) menyatakan bahwa pada umumnya DAU dimanfaatkan untuk belanja rutin daerah seperti belanja pegawai, baik pegawai daerah maupun pegawai pusat. Sehingga variabel DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan RLS.

Sedangkan, variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan RLS adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan koefisien sebesar -0.064458 dan Dana Desa (DD) dengan koefisien sebesar 0.732103. Hal ini didukung oleh Amelia et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan. DAK tidak diberikan kepada seluruh daerah secara merata karena pemberian dana ini mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah dan status daerah tertinggal sesuai ketentuan perundangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya termasuk dalam bidang pendidikan.

Selain itu, Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan seperti sekolah, taman bacaan/perpustakaan desa, balai pelatihan/kegiatan belajar bagi masyarakat, dan berbagai hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah anggaran dana desa yang dialokasikan setiap tahun, maka pemerintah desa semakin mudah untuk melakukan pembangunan fisik ataupun pemberdayaan masyarakat khususnya pembangunan pendidikan.

Terakhir, variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan RLS adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan koefisien sebesar 0.036814. PAD secara umum digunakan untuk belanja pegawai dan sebagian besar daerah menggunakan dana perimbangan dan dana hibah dalam belanja daerah bidang pendidikan (Handayani 2009). Sehingga PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan kesehatan karena pembiayaan bidang pendidikan tidak melalui PAD.

2. Kesenjangan Pengeluaran Perkapita (PPPIneq)

Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan PPP adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dengan koefisien sebesar 0.276362. Hasil ini didukung oleh penelitian Deller et al (2002) dalam Masdjojo dan Sukartono

(2009) yang menyimpulkan pendapatan daerah yang bersumber dari DBH akan meningkatkan pengeluaran per kapita. Sehingga peningkatan DBH yang disebabkan oleh peningkatan kemampuan daerah untuk mengelola potensi daerah secara optimal akan menciptakan celah kesenjangan terhadap daerah yang belum mampu mengelola potensi daerahnya secara optimal.

Variabel yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan PPP adalah jumlah penduduk miskin (POV) dengan koefisien sebesar 0.005268. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya yang disebabkan karena minimnya pendapatan penduduk yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran per kapita. Sehingga kemiskinan tidak secara langsung dapat mempengaruhi kesenjangan pengeluaran per kapita.

Sedangkan, variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan PPP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan koefisien sebesar -0.038464, Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan koefisien sebesar -2.283278, dan Dana Desa (DD) dengan koefisien sebesar -0.225320. Subroto (2014) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. DAK dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendanai pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik yang difungsikan dalam jangka panjang. Kemudian, penelitian Anshari et al. (2019) dan Wardani (2017) menyimpulkan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Ketika upah meningkat maka daya beli atau

pengeluaran masyarakat untuk konsumsi akan mengalami peningkatan. Selanjutnya akan berimplikasi terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa pada suatu daerah sehingga perekonomian membaik yang kemudian akan membuat kesenjangan antardaerah semakin rendah. Selain itu, pemanfaatan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan rumah tangga. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka daya beli mengalami perubahan sehingga pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Ambya (2020) pengalokasian dana desa dapat mengurangi kesenjangan, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat urbanisasi.

Variabel yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan PPP adalah variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan koefisien sebesar 0.097451. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Oktaviani (2017) menyatakan bahwa DAU secara parsial tidak signifikan mempengaruhi kesenjangan pembangunan di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan karena DAU merupakan penyangga utama pembiayaan APBD yang dimanfaatkan untuk belanja pegawai (Setiawan 2010).

Terakhir, variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan PPP adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan koefisien sebesar 0.007709. Hasil ini didukung oleh penelitian Nurhuda (2013) yang menyatakan PAD belum mampu mengurangi kesenjangan dikarenakan secara umum PAD digunakan untuk belanja rutin daerah seperti belanja barang, belanja pegawai, dan lainnya.

Sehingga hal ini menyebabkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PPP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama kurun waktu 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Namun walaupun IPM Indonesia terus meningkat, kesenjangan pembangunan manusia masih terjadi pada level provinsi dan kabupaten/kota. Kesenjangan pembangunan manusia di Indonesia terjadi pada tiga aspek penyusun indeks pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi pada antardaerah di Indonesia, pemerintah menciptakan program dana desa. Dana desa yang disalurkan pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan pada periode 2015 hingga 2019. Penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Berdasarkan hasil estimasi data panel dapat disimpulkan bahwa dana desa, DAK, dan UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan angka harapan hidup. Variabel PAD, DBH, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan angka harapan hidup. Selanjutnya pada estimasi model penelitian kesenjangan rata-rata lama sekolah, variabel dana desa dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan DBH dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan rata-rata lama sekolah. Variabel PAD, DAU, dan UMP tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kesenjangan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, variabel dana desa, DAK, dan UMP berpengaruh negatif signifikan sedangkan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap kesenjangan pengeluaran per kapita. Variabel yang tidak signifikan mempengaruhi kesenjangan pengeluaran per kapita adalah PAD, DAU, dan jumlah penduduk miskin.

Saran

1. Mengingat penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan lebih besar dibandingkan bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat hendaknya diperbesar sehingga dampaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi pengeluaran per kapita dan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan meningkat akibat peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat
2. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan daerah agar total pendapatan daerah meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat adalah dengan pengoptimalan kinerja BUMDes. Sehingga diharapkan pengalokasian dana desa mampu membiayai pengadaan dan mengembangkan BUMDes di masing-masing daerah. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap lapangan kerja disetiap desa semakin luas, angka pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat dan selanjutnya roda perekonomian daerah berjalan baik.
3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengkaji kesenjangan pembangunan manusia sebelum dan setelah diterapkannya program dana desa di

Indonesia agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami M. 2016. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue. [Skripsi]. Aceh Barat (ID): Universitas Teuku Umar.
- Al Karim M, Jati Utomo G, Fauziah B. 2019. Quality of Life and Economic Growth , Case Study of Dki Jakarta and Sub. J. Pambang. Wil. dan Kota. 15(3):227– 247.
- Ambya A. 2020. Transformasi Alokasi Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. J. Ekon. Pambang. 9(1):16– 23.doi:10.23960/jep.v9i1.84.
- Anshari M, Azhar Z, Ariusni A. 2019. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia. J. Ecogen. 1(3):494.doi:10.24036/jmpe.v1i3.499 0.
- Arifatun, Amelia N, Yuliantoro R. 2019. Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018 (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Klaten). Skripsi Univ. Ahmad Dahlan. 2018(Dd).
- Balseven H, Tugcu CT. 2017. Analyzing the Effects of Fiscal Policy on Income Distribution : A Comparison between Developed and Developing Countries. Int. J. Econ. Financ. Issues. 7(2):377– 383.
- Bappeda Papua. Badan Perencanaan Pembangunan. 2020. Infografis Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020. Papua (ID): Bappeda Papua.
- Bappenas.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2011. Jakarta (ID): Bappenas.
- BPS. Badan Pusat Statistik. 2014. Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta (ID): BPS.
- BPS. Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2015. Jakarta (ID): BPS.
- BPS. Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2016. Jakarta (ID): BPS.
- BPS. Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia 2019. Jakarta (ID): BPS.
- BPS. Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Pembangunan Manusia 2020. Jakarta (ID): BPS.
- Dewi N, Yusuf Y, Iyan R. 2016. Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. J. Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau. 4(1):870–882.
- DJPK. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Anggaran Dana Desa Tahun 2018. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan.
- Dueramae A. 2017. Dampak kemiskinan terhadap tingkat pendidikan dalam perspektif ekonomi islam.
- Fadmawati, Farida dan Andy Dwi Bayu Bawono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri). [Skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Firdaus, Muhammad. 2011. Aplikasi Ekonometrika Untuk Data Panel dan Time Series. Edisi Revisi. Bogor (ID): IPB Press.
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometri Dasar.

- Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta:Erlangga
- Handayani K. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. [Skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
- Houghton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. 2012. Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality), Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat N. 2020. Fenomena Migrasi Dan Urban Bias di Indonesia. *J.Geogr.*12(01):245. doi:10.24114/jg.v12i01.16236.
- Kemendes PDPT. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. Realisasi Penggunaan Dana Desa. Jakarta (ID): Kemendes PDPT.
- Kemendes PDPT. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jakarta (ID): Kemendes PDPT.
- Kemenkeu. Kementerian Keuangan. 2020. Memahami Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta (ID): Kemenkeu.
- Kemenkeu. Kementerian Keuangan.. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta (ID): Kemenkeu.
- Lipton, M. 1991. Why Poor People Stay Poor. Urban Bias In World Development. ANU Press.
- Ma'ruf AF, Andy Dwi Bayu Bawono. 2019. Seminar Nasional dan Call For Paper (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019) Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4 . 0. Semin. Nas.(Dd):1–14.
- Mahulauw A, Santosa D, Mahardika P. 2016. The Effect of Health and Education and Infrastructure Expenditures on the Human Development Index in Maluku Province. *J. Dev. Econ.* 14(2):122–148.
- Masdjojo G, Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal Tema.* 6(2):32-50.
- Nurhuda R. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *J. Adm. Publik Mhs. Univ. Brawijaya.* 1(4):110– 119.
- Oktaviani W. 2017. Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembang. Drh.* 6(3):105–112.
- Pudjianto B, Syawie M. 2015. Kemiskinan Dan Pembangunan Manusiapoverity And Human Development. *Sosio Inf.* 1(3):231–246.
- Setiawan A. 2010. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. *9(1):69–81.*
- Subroto G. 2014. HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN EKONOMI: Perspektif
- Suradi. 2007. Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat). *Penelit. dan Pengemb. Kesejaht. Sos.* 12(03):1–11.
- Surya A, Darwanis, Syukriy A. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil

- Terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Jurnal Magister Akuntansi. 4(3):1-15.
- Teori dan Empiris EDUCATION AND ECONOMICS : Perspectives of Theoretical and Empirical. J. Penelit. Kebijak. Pendidik. 6(3):390–400.
- UNDP. United Nations Development Programme. 2004. Indonesia Human Development Report 2004.
- UU. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wardani D. 2012. Proses Penetapan Upah Minimum. [Skripsi]. Purwokerto (ID): Universitas Jendral Sudirman